

Upaya Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Desain Industri antara Crocs, Inc. dan Liberty Shoes Ltd. di India Tahun 2018-2019

Nur Annisa^{1*}, Siti Aisyiyah¹, Yeni Wulandari¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : annisasurya1703@gmail.com

Article History:

Received : 21-01-2026

Accepted : 08-02-2026

Keywords: TRIPs; Dualisme;
Design Act 2000; Desain
Industri

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis upaya litigasi dalam penyelesaian sengketa desain industri antara Crocs, Inc. dan Liberty Shoes Ltd. di India pada periode 2018–2019, dengan menyoroti implementasi ketentuan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dalam hukum domestik India. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori dualisme dalam hukum internasional dan konsep TRIPs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Delhi menolak gugatan Crocs, Inc. dengan mendasarkan putusannya pada ketentuan The Designs Act 2000, khususnya terkait prinsip kebaruan (*novelty*), orisinalitas, dan estetika desain industri. Pengadilan menilai bahwa desain yang diklaim Crocs tidak memenuhi persyaratan hukum karena telah dipublikasikan sebelumnya dan bersifat fungsional. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip dualisme oleh India, di mana hukum internasional tidak berlaku secara langsung, melainkan harus diadopsi dan ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun TRIPs menjadi standar internasional, penegakan perlindungan desain industri tetap sangat bergantung pada norma dan mekanisme hukum domestik negara anggota WTO.

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya desain industri memiliki fungsi krusial dalam melindungi inovasi dan mendukung daya saing produk di pasar internasional (Febriana, 2020). Desain industri tidak hanya memperkuat daya tarik estetika sebuah produk, namun juga menjadi sebuah manifestasi identitas merek dan nilai komersial yang tinggi (Banindro, 2015). Dalam konteks perdagangan internasional yang semakin terbuka dan bebas, perlindungan atas desain industri menjadi hal sangat penting terutama ketika suatu produk telah menembus berbagai pasar lintas yurisdiksi hukum. Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang berada di bawah kerangka *World Trade Organization* (WTO) menjadi acuan penting dalam pembentukan standar perlindungan kekayaan intelektual di tingkat global (WTO, n.d.). TRIPs tidak hanya mengatur prinsip perlindungan atas berbagai HKI, terutama desain industri namun juga mengikat negara-negara anggota untuk menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif di ranah domestik masing-masing (Ardianto, 2013). India sebagai salah satu anggota WTO, telah menyesuaikan sistem hukum domestiknya melalui Design Act 2000 guna memenuhi ketentuan TRIPs, terutama dalam hal perlindungan desain industri (Gupta, 2000).

Meskipun WTO telah mewajibkan negara-negara anggota untuk mengadopsi ketentuan TRIPs terkait desain industri, namun dalam praktiknya pelaksanaan ketentuan TRIPs di beberapa negara masih menemui tantangan khususnya di negara berkembang seperti India. Salah satu studi kasus penting yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Crocs, Inc, *Multinational Corporation* (MNC) alas kaki asal Amerika Serikat dan Liberty Shoes Ltd, perusahaan alas kaki asal India. Crocs menuduh Liberty telah menjiplak desain yang telah didaftarkan secara resmi di India dan melakukan penjualan produk mereka secara massal di berbagai platform daring (ALG India Law Offices LLP, 2018). Gugatan ini dilayangkan ke pengadilan tinggi di India pada tahun 2018 dan mengalami proses litigasi panjang hingga 2019. Periode tahun 2018-2019 menjadi tahun yang krusial dikarenakan terjadi fase-fase penting dalam proses sengketa hukum desain industri antara Crocs, Inc dan Liberty Shoes Ltd. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara lebih dalam upaya litigasi yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa desain industri antar kedua perusahaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan sebuah fenomena secara mendalam melalui analisis makna, konsep, dan norma. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang relevan, meliputi buku teks hukum internasional, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional. Penelitian ini menggunakan teori dualisme dalam hukum internasional dan konsep *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai kerangka analisis. Teori dualisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah, sehingga ketentuan internasional, termasuk TRIPs, tidak berlaku secara otomatis dalam hukum nasional tanpa adanya proses adopsi atau transformasi melalui instrumen hukum domestik (Hassim, 2019). Dalam kerangka ini, TRIPs dipahami sebagai perjanjian internasional yang menetapkan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, yang wajib diimplementasikan oleh negara anggota WTO sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing. Penerapan TRIPs di India mencerminkan pendekatan dualisme, di mana ketentuan TRIPs memperoleh kekuatan hukum setelah diadopsi ke dalam peraturan nasional, sebagaimana terlihat dalam penyelesaian sengketa desain industri antara Crocs, Inc. dan Liberty Shoes Ltd., yang didasarkan pada hukum domestik India sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban internasional sekaligus pemeliharaan kedaulatan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Industrial Design Dalam TRIPs

Desain industri atau *Industrial design* adalah suatu kreasi dalam proses menciptakan suatu produk industri. Desain industri terbentuk dari adanya revolusi di bidang industri yang bermula dari ide, penciptaan suatu produk, serta adanya proses manufaktur yang dimulai pada abad ke 18 di Inggris (Khakim et al., 2022). Desain Industri ini mencakup kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, ataupun komposisi garis dan warna pada suatu produk yang akan diciptakan (Djki, n.d.). Dalam pembuatan produknya ini lebih mengedepankan unsur estetika yang unik ataupun bagaimana produk tersebut terlihat bagus secara visual yang kemudian akan

menarik pembeli. Adanya desain industri pada produk ini ditunjukkan sebagai “pembeda” atau “*distinctiveness*” dalam bidang pemasaran produk agar produk tidak sama (Mayana, 2018). Dalam membuat produk untuk dipasarkan suatu negara harus membuat produk yang orsinil sesuai dengan isi perjanjian dalam TRIPs.

Dalam perjanjian TRIPs, suatu negara-negara anggotanya diwajibkan untuk melindungi desain suatu produknya yang akan dibuat secara orisinil khususnya menonjolkan keindahan tampilan produknya (Abou Naja, 2023). Perjanjian TRIPs ini mengakui bahwa pentingnya menciptakan desain-desain yang kreatif dan baru yang kemudian akan memberikan banyak pilihan pada konsumen berdasarkan daya tarik visual produk tersebut. Namun, dalam TRIPs perlindungan untuk produknya ada jangka waktu yakni 10 tahun. Hal ini, disebabkan karna adanya perubahan pada tren desain dan juga selera konsumen yang berubah dengan cepat. Walaupun, terdapat jangka waktu perlindungan akan tetap relevan dengan dinamika pasar jika negara tersebut harus memperpanjang hak paten desain industrialnya.

Hukum Desain Industri (*Patent Design Law*) di India

Pada tahun 1856, India sudah melakukan perlindungan penemuan dengan menggunakan Undang-Undang yang VI terinspirasi dari hukum Paten Inggris yang kemudian Undang-Undang tersebut direvisi pada 1859 menjadi UU XV yang isinya memperjelas cakupan hak untuk produksi, penjualan, dan penggunaan penemuan dan kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Paten dan Desain India 1911 (Rao, Subba). Dan pada puncaknya disahkan UU The Designs Act, 2000 yang mulai berlaku pada 11 Mei 2001 dan The Designs Rules 2001 (Pandey, 2024) Perlindungan desain industri di India mengalami berbagai perubahan dan adaptasi yang mencerminkan adanya evolusi kebutuhan ekonomi dan adaptasi terhadap standar maupun ketentuan yang tertuang dalam TRIPs. Sebelum UU The Designs Act ini disahkan, India bergantung pada Patents and Designs Act 1911. UU ini menggabungkan perlindungan paten untuk penemuan fungsional dan desain untuk aspek visual produk. Namun, UU ini memiliki keterbatasan yakni penggabungan ini seringkali menimbulkan ambiguitas dan dirasa tidak efisien.

Adanya perubahan Design Act 1911 menjadi Design Act 2000 ini tidak hanya karena adanya kecacatan UU Patens and Designs sebelumnya, namun juga dikarenakan India terikat oleh kewajiban Internasionalnya sebagai anggota WTO yang mengharuskan India mematuhi perlindungan yang sesuai dengan standar WTO yakni TRIPs yang dibentuk tahun 1994. Ketentuan yang termuat dalam Design Act 2000 disusun sedemikian rupa agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam TRIPs serta memperkuat kerangka hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa India menganut sistem hukum dualisme dalam ranah domestik. Dalam konteks perlindungan hukum di India, suatu desain harus memenuhi kriteria agar sah dilindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 prinsip UU The Design Act kumulatif untuk mendaftarkan hak paten desainnya, yakni (Raza & Alam, 2023):

1. Prinsip Kebaruan (*Novelty*)

Prinsip kebaruan yang mengacu pada Pasal 4 ini mengharuskan desain yang akan diajukan dalam pendaftaran harus desain produk yang benar-benar baru di ranah publik sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Desain. Pernyataan ini secara jelas menegaskan bahwa agar bisa terdaftar, desain harus memenuhi standar kebaruan yang artinya, produk tersebut tidak boleh sama dengan atau terlalu mirip dengan desain yang sudah ada di publik.

Jika suatu desain sudah dikenal atau telah dipublikasikan sebelumnya, produk tersebut tidak akan dianggap baru dan tidak akan memenuhi syarat untuk pendaftaran,

2. Prinsip Orisinalitas (*Originality*)

Sesuai dengan Pasal 2(g) The Design Act dalam konteks orisinalitas pada suatu desain tersebut harus merupakan karya asli yang berasal dari penciptanya, bukan hasil dari meniru atau plagiat karya orang lain. Mahkamah Agung India menetapkan hukum desain melalui putusan-putusannya. Meskipun putusan ini jarang digunakan, namun setiap putusan pasti akan melibatkan penilaian apakah desain yang dipermasalahkan tersebut memiliki karakteristik keaslian atau orisinalitas yang cukup untuk mendukung klaim perlindungan atau mempertahankan pendaftaran. Ini mengimplikasikan bahwa orisinalitas adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu desain dianggap valid secara hukum,

3. Prinsip Estetika (*Aesthetic Appeal*)

Sesuai dengan pasal 2(d) Prinsip Estetika merupakan ciri khas dari adanya perlindungan suatu desain, hal ini berfokus pada penampilan visual suatu produk, bukan ada pada fungsinya. Desain yang dilindungi adalah desain yang menarik perhatian dan dinilai semata-mata oleh mata. Hal ini membedakan desain dari paten, yang melindungi aspek fungsional atau teknis. Secara tidak langsung prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan desain di India hanya diberikan pada desain yang terdaftar. Hal Ini juga berarti bahwasanya desain harus memiliki daya tarik visual yang memenuhi kriteria estetika tertentu agar dapat didaftarkan. Desain yang murni fungsional atau tidak memiliki nilai estetika independen kemungkinan besar tidak akan memenuhi syarat dalam pendaftaran.

Profil *Crocs, Inc* dan *Liberty Shoes Ltd*

Crocs, Inc. merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alas kaki asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 2002 dan dikenal dengan produk berbahan ringan, tahan lama, tahan air dan nyaman dipakai. Seiring berjalannya waktu, *Crocs* mulai melakukan ekspansi internasional ke berbagai negara berkembang, termasuk India. *Crocs* memasuki pasar India pada tahun 2007 melalui kemitraan dengan Chogori India Retail Ltd., menggunakan model *franchise* dalam memperluas distribusi dan membuka toko ritel di beberapa kota besar di negara tersebut (Saeed et al., 2021). Sejak saat itu, *Crocs* berhasil memperluas jangkauannya ke lebih dari 200 kota dan membuka lebih dari 100 gerai fisik, dengan fokus tidak hanya pada kota tier-1, tetapi juga kota tier-2 dan tier-3 melalui anak perusahaannya di India yaitu *Crocs India Pvt. Ltd.* yang berkantor pusat di Gurugram, Haryana, India (Kadakia, 2023). Pada tahun 2023, *Crocs* mulai mengepakkan sayapnya dengan mengakuisisi dua fasilitas manufaktur di Tamil Nadu untuk memperkuat rantai pasok lokal dan mengurangi ketergantungan pada produksi di luar negeri seperti China dan Vietnam. Hal tersebut menandakan misi jangka panjang *Crocs* terhadap pasar India (Kadakia, 2023).

Disisi lain, terdapat rival dari *Crocs Inc* dalam ekspansinya ke India yakni *Liberty Shoes Ltd.* *Liberty Shoes Ltd.* Merupakan sebuah produsen alas kaki terbesar dan terkemuka di India yang berdiri pada tahun 1954 dan bermarkas di Karnal, Haryana. Pada mulanya, perusahaan ini hanya memproduksi sepatu untuk pasar domestik India, namun seiring berjalannya waktu menjadi semakin melesat dan berkembang ke pasar internasional dengan kesuksesannya mengeksplor ke lebih dari 25 negara, termasuk Jerman, Prancis, Italia, dan Amerika Serikat (*Liberty Shoes*, n.d.). *Liberty* dikenal karena kombinasi antara teknologi manufaktur modern dengan desain yang berorientasi pada gaya hidup masyarakat India yang dinamis. *Liberty*

Shoes Ltd memiliki kapasitas produksi mencapai lebih dari 50.000 pasang sepatu per hari serta mengoperasikan enam unit produksi dan memiliki lebih dari 400 outlet eksklusif di seluruh India (ICRA, 2022). Merek-merek di bawah payung Liberty seperti Fortune, Warrior, Gliders, dan Coolers telah membantu menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari kelas pekerja hingga konsumen kelas menengah atas (Liberty, n.d.). Dalam beberapa tahun terakhir, Liberty juga mulai merambah pada bidang inovasi digital, termasuk peluncuran platform *e-commerce* dan kolaborasi bersama *marketplace online* dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi bisnis saat ini.

Upaya Litigasi Dalam Sengketa Desain Industri Crocs, Inc dan Liberty Shoes Ltd di India Tahun 2018-2019

Pada tanggal 8 Mei 2018 Crocs, Inc. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Delhi atau *Delhi High Court*. Gugatan ini ditujukan kepada Liberty Shoes yang diduga melakukan pelanggaran desain yang dimiliki oleh Crocs. Crocs Inc menduga dalam gugatannya bahwa dua dari desain terdaftarnya (Desain Terdaftar No.197685, dan Desain Terdaftar No.197686) dilanggar oleh tergugat (India Kanoon, n.d.). Dalam kasus ini, objek yang di sengkatakan masuk dalam kategori Class 2- *Articles of leather;travel goods;handbags;articles of saddlery;harness;footwear* (Government of India, 2000).



Gambar 1. Desain Clog Pada Produk Crocs

Sumber: Official Website Crocs

Crocs, Inc menduga bahwa fitur desain mereka yang melekat pada alas kaki produksi mereka memiliki bentuk, konfigurasi, pola, ornamen, dan komposisi garis (desain) yang baru, orisinal, dan unik (Saeed et al., 2021). Berdasarkan pendaftaran desain yang dilakukannya pada tanggal 8 Mei 2003 dan mulai berlaku sejak 2004, Crocs, Inc seharusnya memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan, menerapkan, menerbitkan, memamerkan desain yang berkaitan dengan barang dan bisnisnya dan untuk mencegah penggunaan pihak ketiga yang melanggar.

Meskipun tergugat (Liberty Shoes Ltd) menyadari hak-hak penggugat (Crocs, Inc), namun realitanya berdasarkan pendaftaran, penggunaan, dan semua manfaat penggugat dalam desain tersebut mereka gunakan untuk kepentingan komersial yang menguntungkan perusahaannya. Diduga bahwa kemiripan antara desain kedua perusahaan tersebut sangat mirip sehingga hampir tidak mungkin terjadi kecuali dengan peniruan yang disengaja (Ghosh & Khan, 2018). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan desain oleh para tergugat telah terjadi sejak awal dan merupakan pembajakan dari desain Crocs, Inc. Dari adanya

penggunaan desain ilegal oleh terdakwa, Crocs, Inc mengalami kerugian besar baik dalam bisnis maupun reputasi (The Economic Times, 2025). Para pembeli tidak menyadari bahwa produk yang mereka beli memiliki desain tiruan dan bukan produk asli Crocs di berbagai platform belanja daring sejak tahun 2015. Merasa dirugikan oleh hal tersebut, Crocs, Inc segera melakukan penyelidikan di pasaran dan memastikan bahwa alas kaki tergugat yang dipermasalahkan membanjiri toko-toko tergugat dalam jumlah yang sangat besar.

Liberty Shoes menyangkal bahwa mereka melanggar desain terdaftar milik penggugat. Pengacara hukum yang diutus oleh Liberty berpendapat bahwa tidak mungkin terdapat pembajakan desain terdaftar jika pendaftaran yang diberikan kepada penggugat sehubungan (alas kaki) tersebut merupakan pendaftaran yang tidak sah. Hal tersebut didasari oleh argumen berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Ayat (4) yang menyatakan bahwa karena pendaftaran desain yang diberikan kepada penggugat tidak sah maka tidak ada kasus yang dapat diajukan atas pembajakan desain terdaftar milik penggugat (India Kanoon, n.d.). Selain itu, dinyatakan pula oleh tergugat bahwa berdasarkan Klausul (b) hingga (d) Sub-Bagian (1) dari Pasal 19 Undang-Undang Design Act 2000, jika desain terdaftar penggugat pada saat pendaftaran bukanlah desain baru atau asli atau ada publikasi sebelumnya dari desain terdaftar. Hal tersebut terbukti oleh temuan dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa desain tersebut telah ada dan dijual oleh sebuah perusahaan bernama Holey Soles sebelum dipublikasi oleh Crocs, Inc. Selain itu, tergugat juga dapat membuktikan melalui hasil tangkapan layar bahwa desain yang di klaim oleh penggugat sebagai desain eksklusif sejak tanggal penetapan desain industrinya pada tahun 2003 pada kenyataannya telah di *publish* oleh penggugat sendiri dalam *website* resminya pada tanggal bahwa 16 Oktober 2002, 24 November 2002, 25 November 2002, 28 November 2002 dan 13 Desember 2002 (India Kanoon, n.d.).

Berdasarkan pelanggaran terhadap kedua UU yang dijelaskan di atas, maka hasil putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi Delhi tahun 2019 menyatakan bahwa gugatan Crocs, Inc ditolak oleh Hakim disebabkan tidak sejalan dengan prinsip hukum Design Act 2000 (Raza & Alam, 2023) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 4 memuat ketentuan pelarangan pendaftaran kategori desain tertentu jika :
 - a. Bukan baru atau asli; atau
 - b. Telah diungkapkan kepada publik di mana pun di India atau di negara lain mana pun melalui publikasi dalam bentuk nyata atau melalui penggunaan atau dengan cara lain apa pun sebelum tanggal pengajuan, atau jika berlaku, tanggal prioritas permohonan pendaftaran;" atau
 - c. Tidak dapat dibedakan secara signifikan dari desain yang dikenal atau kombinasi desain yang dikenal;"
2. Pasal 19 memuat ketentuan untuk memungkinkan terjadinya pembatalan desain menetapkan bahwa setiap "orang yang berkepentingan" dapat mengajukan permohonan kepada Pengawas dengan alasan-alasan berikut,
 - a. Bahwa desain tersebut sebelumnya telah didaftarkan di India; atau
 - b. Bahwa desain tersebut telah dipublikasikan di India atau di negara lain mana pun sebelum tanggal pendaftaran; atau
 - c. Bahwa desain tersebut bukan desain baru atau asli; atau
 - d. Bahwa desain tersebut tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang ini; atau
 - e. Bahwa desain tersebut bukan desain sebagaimana didefinisikan dalam klausul (d)

3. Penasihat hukum berpendapat bahwa pembelaan terdakwa bahwa desain terdaftar Crocs, Inc tidak termasuk dalam definisi desain yang ditetapkan berdasarkan pasal 2(d) Undang-Undang karena merupakan desain fungsional bukan estetika, yang mendorong hakim untuk memutuskan bahwa tidak ada hal baru di dalamnya.

Hakim secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran yang diberikan kepada Crocs Inc secara hukum cacat dan dapat dibatalkan berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Design Act 2000. Selain dibatalkan pendaftarannya, Crocs juga dibebankan dengan sejumlah biaya ganti rugi kepada tergugat senilai 200.000 Rupee atau Rp 39.200.000 dengan batas waktu pembayaran 8 minggu sejak ditetapkan oleh Hakim (LexOrbis, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya litigasi dalam penyelesaian sengketa desain industri yang melibatkan *Crocs, Inc* dan *Liberty Shoes Ltd* di India tahun 2018-2019 telah mencerminkan wujud dualisme. Hal tersebut terlihat dari India yang mengimplementasikan hukum internasional TRIPs melalui Design Act 2000 dengan prinsip bahwa suatu desain industri harus mengandung unsur kebaruan (*novelty*), orisinalitas dan estetika untuk dilindungi secara sah di mata hukum india. Peradilan sengketa antara Crocs, Inc dan Liberty Shoes yang terjadi di Delhi High Court atau Pengadilan Tinggi Delhi tidak secara langsung merujuk kepada TRIPs, namun menggunakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 19 dalam Design Act 2000 untuk menilai kelayakan gugatan yang dilayangkan oleh Crocs kepada Liberty Shoes di Pengadilan Tinggi Delhi atau *Delhi High Court*. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Triepel bahwa hukum internasional (TRIPs) hanya dapat diterapkan setelah diadopsi serta diratifikasi dalam hukum domestik di negara tersebut, yakni India.

KESIMPULAN

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) merupakan perjanjian hukum internasional di bawah kerangka *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur standar minimum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk desain industri. Sebagai negara anggota WTO, India berkewajiban mengimplementasikan ketentuan TRIPs ke dalam hukum nasionalnya melalui The Design Act 2000. Berdasarkan analisis terhadap sengketa desain industri antara Crocs, Inc. dan Liberty Shoes Ltd. pada periode 2018–2019, dapat disimpulkan bahwa pengadilan di India menerapkan ketentuan hukum domestik tanpa merujuk secara langsung pada TRIPs. Gugatan Crocs, Inc. ditolak dan pendaftaran desainnya dinyatakan cacat hukum, sehingga Crocs dibebankan kewajiban pembayaran biaya perkara kepada Liberty Shoes Ltd. sebesar 200.000 Rupee. Putusan ini menunjukkan bahwa India menganut pendekatan dualisme dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, di mana ketentuan TRIPs hanya memiliki kekuatan hukum setelah diadopsi dan ditransformasikan ke dalam peraturan domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abou Naja. (2023, January 19). *Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) Agreement*. AbouNaja IP. <https://abounaja.com/blog/trips-agreement-of-1995>
- [2] Adz-hiya, S. W., Rizhani, N. S., Halimah, S. N., & Nirwana, R. (2023). Urgensi pengaturan hukum Indonesia menggunakan Hague System guna melindungi hak kekayaan intelektual bidang desain industri. *Diponegoro Private Law Review*, 9(2), 181–204. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/21056>

- [3] ALG India Law Offices LLP. (2018, March 1). *Crocs registered footwear design refused protection*. ALG India Law Offices LLP. <https://www.algindia.com/crocs-footwear-registered-design-held-invalid/>
- [4] Ardianto, B. (2013). Implikasi yuridis prinsip national treatment dalam TRIPs-WTO terhadap pengaturan perlindungan hak cipta di Indonesia. *Majalah Hukum Forum Akademika*, 93–114.
- [5] Banindro, B. S. (2015). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual. 140 halaman. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7B-EDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=hak+desain+industri&ots=znJgxES-_n&sig=LCcWJXhoPY6PFfzdocq6UUbpbmI
- [6] C. Hari Shankar (Judge). (2025, July 1). *M/S Crocs Inc USA vs M/S Bata India & Ors* (RFA (OS) (Comm) 22/2019). *High Court of Delhi at New Delhi*. Retrieved from <https://indiankanoon.org/doc/53426293/>
- [7] Emerson Thomson Bennett. (2026, February 3). What is the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)? ETB Law. <https://www.etblaw.com/what-is-the-agreement-on-trips/>
- [8] Febriana, A. (2020). Hak Kekayaan Intelektual di dalam Bidang Desain Industri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen*, 14(1).
- [9] Ghosh, E., & Khan, A. B. (2018). Lacking a European touch: The Delhi High Court design law ruling in Crocs Inc v. Liberty Shoes. *Stockholm Intellectual Property Law Review*, 1(1), 64–68. <https://doi.org/10.59625/siplr.v1i1.63288>
- [10] Government of India. (2000). *The Designs Act, 2000 (Act No. 16 of 2000)*. Ministry of Law and Justice, Government of India. <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1917/1/200016.pdf>
- [11] Gupta, P. (2022). India's design rights: A look into the non-compliance of the Design Act, 2000 with international conventions. *Indian Journal of Integrated Research in Law*, 2(1), 888–894. Retrieved from <https://ijirl.com/wp-content/uploads/2022/01/INDIAS-DESIGN-RIGHTS-A-LOOK-INTO-THE-NON-COMPLIANCE-OF-THE-DESIGN-ACT-2000-WITH-INTERNATIONAL-CONVENTIONS.pdf>
- [12] Hasim, H. (2019). Hubungan hukum internasional dan hukum nasional: Perspektif teori monisme dan teori dualisme. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2), 166–179. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10623>
- [13] ICRA Limited. (2022). *Credit rating report: Liberty Shoes Ltd*. ICRA Limited. <https://www.icra.in/Rationale/ShowRationaleReport?Id=11497>
- [14] Kadakia, P. M. (2023, September 25). 'Manufacturing in India is an important part of our strategy': Crocs CEO Andrew Rees. *Forbes India*. Diakses dari <https://www.forbesindia.com/article/leadership/manufacturing-in-india-is-an-important-part-of-our-strategy-crocs-ceo-andrew-rees/88507/1>
- [15] Khakim, H., Program, W. H., & Kenotariatan, S. M. (2022). Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *NOTARIUS*, 15(1).
- [16] LexOrbis. (2019, October 22). Supreme Court affirms the High Court's order directing Crocs to pay the cost of proceedings. Diakses dari <https://www.lexorbis.com/supreme-court-affirms-the-high-courts-order-directing-crocs-to-pay-the-cost-of-proceedings/>

- [17] Liberty Shoes. (n.d.). *About Us*. Liberty Shoes.
- [18] Lukose, L. P., & Abrol, C. (2024). Need for Unregistered Design Rights in India: A Contemplative Cogitation. *Journal of Intellectual Property Rights*, 29(1), 33–42. <https://doi.org/10.56042/jipr.v29i1.757>
- [19] Mayana, R. F. (2018). Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri Di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual Dan Perbandingan Hukum. *Litigasi*, 18(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.602>
- [20] Morajaya, D. R. (2023). Penerapan TRIPs Agreement berdasarkan perspektif sociological jurisprudence dan efektivitas hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia: Studi kasus perdagangan sepatu tiruan merek Nike di Indonesia. *Jatiswara*, 38(3), 291–304. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i3.516>
- [21] Pandey, P. (2024, November 11). *Designs Laws and Regulations India 2025*. Iclg.
- [22] Raza, A., & Alam, G. (2023). Design Law Declared by the Supreme Court of India. *Journal of Intellectual Property Rights*, 28(3), 236–241. <https://doi.org/10.56042/jipr.v28i3.601>
- [23] Raza, A., & Alam, G. (2023). Design Law Declared by the Supreme Court of India. *Journal of Intellectual Property Rights*, 28(3), 236–241. <https://doi.org/10.56042/jipr.v28i3.601>
- [24] Saeed, M., Salo, M., Ondracek, J., & Bertsch, A. (2021). Crocs, Inc.: Managing Corporate Resources (Strategic Perspectives). *Delhi Business Review*, 22(2), 105–123. <https://doi.org/10.51768/dbr.v22i2.222202113>
- [25] The Economic Times. (2025, July 1). *Delhi High Court revives Crocs' passing off petition against Bata, Liberty, others*. *The Economic Times*. Diakses dari <https://economictimes.indiatimes.com/news/company/corporate-trends/delhi-high-court-revives-crocs-passing-off-petition-against-bata-liberty-others/articleshow/122187756.cms>
- [26] Tulasi, G. K., & Subba Rao, B. (2008). A detailed study of patent system for protection of inventions. *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 70(5), 547–554. <https://doi.org/10.4103/0250-474X.45390>
- [27] United States Patent and Trademark Office. (n.d.). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. U.S. Patent and Trademark Office. <https://www.uspto.gov/ip-policy/international-ip-treaties#ParisConvention>
- [28] World Trade Organization (WTO). (n.d.-a). *Part II — Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights* (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). WTO. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/trips_e.htm#part2
- [29] World Trade Organization (WTO). (n.d.-b). *Overview of the TRIPS Agreement*. WTO. https://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/intel2_e.htm
- [30] World Trade Organization (WTO). (n.d.-c). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). WTO. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
- [31] WTO. (n.d.). *TRIPS — Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. World Trade Organization. Diakses dari <https://www.wto.org/trips>